



## KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

**Aldi Gunawan**

Universitas Holu Oleo, Indonesia

Corresponding Author: [gunawanaldi12@gmail.com](mailto:gunawanaldi12@gmail.com)

### Info Article

Received :  
10 Maret 2023  
Revised :  
07 April 2024  
Accepted :  
01 Mei 2024  
Publication :  
31 Mei 2024

### Keywords:

Financial  
Performance,  
Ratio, Local  
Revenue

### Kata Kunci:

Kinerja Keuangan,  
Rasio, Pendapatan  
Asli Daerah

*Licensed Under a  
Creative Commons  
Attribution 4.0  
International  
License*



**Abstract:** *This research is entitled Kolaka Regency Regional Financial Performance. The aim is to find out the Regional Financial Performance of Kolaka Regency. The method of analysis is to use a comparative descriptive method that describes the financial performance of the Regional Government and uses financial ratios. The results showed that data processing and data analysis results that refer to the problems and research objectives, can be concluded as follows, The development of the effectiveness level of regional financial management in Kolaka Regency during the 2016-2020 fiscal year can be said to be very effective, namely by having an average effectiveness ratio above 100%. For further research, it is hoped that researchers can compare the financial performance of regencies or cities that have great potential in managing their regional finances, so that the research results have a clearer contribution that there are certain regencies or cities that have better financial performance than other regencies or cities.*

**Abstract:** Penelitian ini berjudul Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka. Tujuannya adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka. Metode analisisnya adalah menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan menggunakan rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut, Perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kolaka selama tahun anggaran 2016-2020 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata di atas 100%. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat membandingkan kinerja keuangan Kabupaten atau kota yang memiliki potensi besar dalam mengelola keuangan daerahnya, sehingga hasil penelitian lebih memiliki kontribusi yang jelas bahwa ada kabupaten atau kota tertentu yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari kabupaten atau kota yang lainnya.

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik pula (Sularso dan Restianto, 2011:114). Adapun, salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2002:126). Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD (Halim, 2002:136).

Mewujudkan *good government* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma tersebut, pemerintah otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah yang diganti dengan UU No. 23 tahun 2014, kemudian disempurnakan dengan UU No. 9 tahun 2015 serta untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan juga UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini erat kaitannya karena secara otomatis dengan adanya peralihan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa mengolah keuangan di masing-masing daerah.

Dalam UU No. 33 tahun 2004 menyatakan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan instansi vertikal perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan (Dien et al, 2015).

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Halim, 2012). Analisis laporan keuangan adalah kegiatan untuk menginterpretasikan angka - angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2010). Analisis terhadap laporan keuangan dianggap menjadi alat manajerial yang penting untuk evaluasi kekuatan, dan kelemahan suatu perusahaan, dan menurut Groves, Godsey, dan Shulman dalam Turley (2014).

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar pos yang ada di antara laporan keuangan Hery (2015).

Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah diperlukan alat yang digunakan untuk analisis, salah satu alat yang sering digunakan untuk mengetahui kinerja suatu organisasi adalah menggunakan rasio keuangan. Berikut ini merupakan salah satu rasio keuangan yang dikembangkan berdasarkan data keuangan.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang

tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Handayani S. (2006) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri Sedarmayanti (2009). Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor faktor pendukung efektivitas.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”

Efektivitas pengelolaan anggaran daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target yang ditetapkan dalam APBD. Rumusan rasio efektivitas pengelolaan anggaran belanja adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2007). Adapun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900–327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut:

- a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
- c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- e) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Kata efisien berasal dari bahasa latin *efficere* yang berarti menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987) yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Pengukuran Efisiensi

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Rumusan efisiensi yang akan digunakan adalah rasio dari realisasi pengeluaran (belanja) daerah dengan total realisasi belanja daerah.

Adapun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900 – 327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

- a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- e) Jika hasil pencapaian kurang dari 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Keynes mengemukakan bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian. Sejak saat itu, para ekonom mulai mempertimbangkan dampak makro atas belanja pemerintah dan pajak. Keynes menekankan bahwa kenaikan belanja pemerintah tidak hanya memindahkan sumber daya dari swasta ke pemerintah. Intervensi pemerintah, yang dikenal dengan kebijakan fiskal, salah satunya dilakukan melalui kebijakan pengeluaran/belanja pemerintah.

Pemikiran ekonom – ekonom aliran Keynesian dimana mereka mendasari pemikiran bahwa variabel pemerintah (khususnya anggaran) dianggap sebagai salah satu variabel penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dan nantinya hal ini diharapkan akan menciptakan *Multiplier effect* pada sektor - sektor ekonomi lainnya. *Multiplier effect* pengeluaran pemerintah ini akan semakin besar jika asumsi bahwa belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif dapat terpenuhi. Penerapan kebijakan otonomi daerah mengakibatkan pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke

daerah. Pemerintah daerah berubah menjadi sebuah pemerintahan sendiri yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur daerahnya dalam batasan hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini tercatum dalam *European Charter of Local Self Government* (Bailey dalam Siagian 2010): *Local self government denotes the right and the ability of local authorities, within the limits of the law, to regulate and manage substantial share of public affairs under their own responsibility and in the interest of the local population...local authorities shall be entitled within national economic policy to adequate financial resources of their own, of which they may dispose freely within the framework of their powers.*

Sehingga dengan diberlakukannya kebijakan/sistem otonomi daerah, maka setiap wilayah kabupaten/kota dapat menyediakan berbagai pelayanan publik yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan efek dinamisnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memiliki 4 peran yaitu :

1. Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal.
2. Peran distributif, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil dan wajar.
3. Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian apabila berada dalam keadaan disequilibrium.
4. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program yaitu:

1. Belanja pegawai, merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

3. Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
4. Belanja hibah, berupa pengeluaran sukarela yang diberikan pemerintah kepada pemerintah luar negeri, organisasi internasional, badan usaha milik negara.
5. Belanja bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus, tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
6. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
7. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
8. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, seperti:

1. Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pengadaan barang

dan pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak atau penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari – hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

3. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Namun demikian, pada kenyataannya banyak daerah yang masih tergantung pada dana transfer dari pusat karena minimalnya PAD.

Fenomena ini perlu dikaji, karena jika dilihat berdasarkan data yang ada, potensi ekonomi yang dimiliki daerah untuk mengembangkan PAD masih cukup besar, namun potensi-potensi tersebut belum dapat digali dengan baik (*djpk.depkeu.go.id*). Hal tersebut menjadikan dimensi keuangan daerah otonom yang paling krusial untuk diteliti adalah dimensi efektivitas keuangan daerah otonom sebagai indikator keberhasilan daerah dalam merealisasikan PAD yang dianggarkan (Dwiranda, 2007:4).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:129). berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul “ Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka”. Tujuan Penelitiannya itu Bagaimana tingkat efisiensi belanja daerah kabupaten kolaka pada tahun 2016-2020?, bagaimana tingkat efektivitas belanja daerah kabupaten kolaka pada tahun 2016-2020

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian diskriptif dan/bersifat studi kasus yang dikaji secara kuantitatif. Sugiyono (2009:206) menyatakan bahwa analisis diskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam hal ini dipaparkan posisi fiskal daerah dan juga kondisi keuangan Kabupaten kolaka, sedangkan secara kuantitatif dihitung perkembangan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten kolaka. Unit analisis pada penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah Kabupaten kolaka tahun 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif selama lima tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020, yang diperoleh dari publikasi kementerian keuangan Ri berupa laporan tahunan yang bersangkutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian dan sebagai institusi melalui data seri waktu (*time series*) pengumpulan data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kab. kolaka Data-data LRA tersebut diperoleh dari publikasi kementerian keuangan Ri.

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:132) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kinerja pemerintah dikatakan efektif apabila rasio antara 90,01% s/d 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk (Yunianti, 2015). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2013:141)

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sangat efektif - >100%
2. Efektif - 100%
3. Cukup efektif - 90%-99%
4. Kurang efektif - 75%-89%
5. Tidak efektif - < 75%

Sumber : Mahmudi (2013:141).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Efektivitas PAD Kab. Kolaka

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:129). Target dan Realisasi PAD Kab. kolaka tahun anggaran 2016-2020 disajikan pada Tabel berikut:

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD
2016	72,323,532,838	72,581,083,337
2017	122,419,728,540	80,163,288,77
2018	101,143,712,551	83,636,913,372
2019	112,252,979,802	107,044,262,997
2020	117,416,199,330.69	180,643,516,200

Sumber : Data Diolah

### Perhitungan Rasio Efektivitas Kabupaten Kolaka

Berdasarkan data target dan realisasi PAD yang disajikan sebelumnya dapat diketahui nilai rasio efektivitas PAD dan interpretasi nilai efektivitas PAD Kabupaten kolaka. Tabel sebagai berikut:

Tahun	Rasio Efektivitas	Kemampuan keuangan
2016	99,64%	Efektif
2017	152,71%	Sangat Efektif
2018	120,93%	Sangat Efektif
2019	104,86%	Sangat Efektif
2020	64,99%	Tidak Efektif
<b>Rasio Rata-Rata</b>	<b>108,626%</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber : Data Diolah

### Analisis Efektivitas Kabupaten Kolaka

Tingkat efektivitas PAD Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2016-2020 diuraikan sebagai berikut.

- a. Pada tahun 2016, rasio efektivitas Kabupaten Kolaka sebesar 99,64%. Kinerja keuangan Kabupaten Kolaka berdasarkan rasio efektivitas PAD tergolong efektif karena berada dalam kisaran mendekati 100%. Hal tersebut menggambarkan pencapaian PAD tahun 2016 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp72,581,083,337. Realisasi PAD pada tahun 2016 sebesar Rp 72,323,532,838.
- b. Pada tahun 2017, rasio efektivitas Kabupaten Kolaka meningkat sebesar 152,71%. Kinerja keuangan Kabupaten Kolaka tahun 2017 berdasarkan rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif. Realisasi PAD Kabupaten Kolaka berhasil melampaui target PAD yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.122,419,728,540 dari target PAD sebesar Rp.80,163,288,774. Realisasi PAD pada tahun tersebut meningkat sebesar 59,07% dari tahun 2016.
- c. Pada tahun 2018, rasio efektivitas Kabupaten Kolaka sebesar 120,93% atau menurun sebesar -21,03% dari tahun 2010. Kabupaten Kolaka berhasil merealisasikan PAD lebih besar Rp 17.506.799.179 melampaui target yang ditetapkan. Kinerja keuangan Kabupaten Kolaka pada tahun ini berdasarkan efektivitas PAD tergolong sangat efektif, karena rasio melebihi 100%.
- d. Pada tahun 2019, rasio efektivitas Kabupaten Kolaka sebesar 104,86% atau meningkat sebesar 9,90% dari tahun 2018. Kabupaten Kolaka mampu merealisasikan PAD lebih

besar Rp 5.208.716.805 dari target yang ditetapkan, sehingga kinerja keuangan Kabupaten Kolaka pada tahun 2019 berdasarkan rasio efektivitas tergolong sangat efektif.

- e. Pada tahun 2020, rasio efektivitas Kabupaten Kolaka menurun sebesar 39,87% dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 64,99%. PAD Kabupaten Kolaka tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 117,416,199,330.69, realisasi tersebut meningkat sebesar 4,40% dari realisasi PAD tahun 2019. Namun kinerja keuangan Kabupaten Kolaka pada tahun ini berdasarkan efektivitas PAD tergolong tidak efektif, karena berada pada kisaran kurang dari 75%.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Kolaka pada tahun 2016-2020 memiliki tingkat efektivitas di atas 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam mengelola anggaran daerah Kabupaten Kolaka sangat efektif, yaitu tepat pada apa yang telah menjadi target anggaran. Selama tahun 2016-2020 anggaran PAD semakin meningkat, dengan nilai efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 152,71% yang mengalami peningkatan sebesar 59,07% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan nilai efektivitas terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu dengan persentase 64,99% yang mengalami penurunan sebesar 39,87% dibanding tahun 2019 dengan persentase sebesar 104,86%. Meskipun mengalami grafik yang naik turun, nilai persentase efektivitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Kolaka selama 5 tahun periode anggaran sangat efektif, yaitu dengan hasil persentase keseluruhan nilai efektivitas rata-rata yang menunjukkan nilai di atas 100%.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut, Perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kolaka selama tahun anggaran 2016-2020 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata di atas 100%.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang sudah dipaparkan maka dapat diberikan saran sebagai berikut, Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat membandingkan kinerja keuangan Kabupaten atau kota yang memiliki potensi besar dalam mengelola keuangan daerahnya, sehingga hasil penelitian lebih memiliki kontribusi yang jelas bahwa ada kabupaten atau kota tertentu yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari kabupaten atau kota yang lainnya.

keterbatasan penelitian yang sudah dipaparkan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- 1 Menggunakan metode analisis yang lebih bervariasi tidak hanya efektifitas dan efisiensi, sebaiknya menggunakan konsep value for money untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah.
- 2 Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan perbandingan belanja daerah antara satu daerah dan daerah lain agar dapat diketahui kemampuan daerah tersebut dalam merealisasikan belanja daerah.
- 3 Untuk pemerintah daerah, belanja langsung yang kurang efektif, baiknya ditingkatkan dengan cara meminimalkan selisih antara realisasi dengan rencana anggaran belanja daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, W. F. ., Qolbi, S. W. ., Aiman, A. N. ., Widyawati, W. ., & Latifah, E. . (2023). PELUANG DAN TANTANGAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(01), 11–20. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.538>
- Amalia dan Pratolo. (2013). ANALISIS TERHADAP DUGAAN PEMANFAATAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN OLEH INCUMBENT DALA PEMILUKADA SERTA EFEKTIVITASNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Jurnal Akuntansi & Investasi* Vol. 14 No. 1, (1-13) <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/492/784> .
- Arifin, A. ., Amang, B. ., & Ramlawati, R. (2022). PERBANDINGAN PENETAPAN TARIF PEMBAYARAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BAUBAU. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(04), 343–355. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i04.459>
- Arusani, A., Kusuma, U. W. ., & Harimau, L. I. . (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(02), 123–136. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.53>

- Bisma dan susanto. (2010). EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2003-2007. Universitas Mataram. Mataram. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol 4. No. 3. (2010) <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/12.-I-Dewa-Gde-Bisma>.
- Ernawati, E. (2022). ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP DEVIDEN PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2012-2016. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(03), 263–280. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i03.269>
- Fahlevi dan Anantha. (2015). ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN BELANJA LANGSUNG - STUDI PADA SKPD DI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH. Universitas Syah Kuala. Aceh. *JIAP* Vol 2. (2015) <http://www.rp2u.unsyiah.ac.id>
- Fredy. (2022). PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA PADA SEKRETARIAT DPRD BUTON. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(01), 56–73. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i01.132>
- Indrianti, T. . (2024). HUBUNGAN PEMBAGIAN KERJA DAN WEWENANG KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PADA BRI KOTA KENDARI. *JIEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 1(02), 166–189. <https://doi.org/10.62668/jiem.v1i02.1063>
- Irwan, I., Adam, P., & Razak, A. (2024). PENGARUH PEMBERDAYAAN KERJA, KARAKTERISTIK PEKERJAAN, DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOLAKA TIMUR. *JIM : Journal Of International Management*, 3(01), 27–45. <https://doi.org/10.62668/jim.v3i01.1009>
- La Ode Farum. (2022). ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA INDONESIA . *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(01), 35–47. <https://doi.org/10.62668/jiar.v1i01.119>
- Littamahuputti, Kumenaung dan Tolosang. (2015). ANALISIS KINERJA PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH(STUDI PADA APBD KOTA

- MANADO). Universitas Sam Ratulangi. Manado  
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/viewFile/6442/5969>
- Muslim, C. ., Saenong, Z. ., & Hastuti, H. (2023). PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI 2015-2021. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(04), 233–240.  
<https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i04.930>
- Pardana, D. (2022). ANALISIS NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02), 103–116.  
<https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.557>
- Rahmatia. (2022). ANALISIS RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BAUBAU. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(01), 74–87.  
<https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i01.133>
- Rais R, M. . (2023). EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BAUBAU . *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 1–11.  
<https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i01.507>
- Riaweni, W. O. I. ., Sutrisno, A. ., Musliani, M., & Masna, M. (2022). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BUMBES BERSAMA DESA KAPOTA. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(02), 155–164.  
<https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.60>
- Rudi Abdullah. (2022). ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIKAITKAN DENGAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2017-2021. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(01), 37–44.  
<https://doi.org/10.62668/jisef.v1i01.124>
- Saenong, Z. ., Muslimin, M. ., & Nur Afiat, M. . (2022). ANALISIS POTENSI RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(02), 100–106.  
<https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.54>

- Sarnani. (2022). ANALISIS BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU . *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(01), 10–24. <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i01.117>
- Sri Ayu Ningsih. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN SERTA KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA . *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(01), 25–34. <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i01.118>
- Sumenge, Ariel. (2013). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) MINAHASA SELATAN. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 1, No 3. 2013). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/1941/1538>
- Sutrisno, A. ., Arusani, A., Diana, L. ., & Fatmawati, F. (2022). ANALISIS ALOKASI BELANJA DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN WAKATOBI. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(02), 156–180. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.62>
- Susi Sulastrri. (2022). ANALISIS DANA DESA SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016-2019. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(01), 28–37. <https://doi.org/10.62668/jide.v1i01.113>
- Surni, S., Riaweni, W. O. I. ., Rostina, R., & Fatmawati, F. (2022). TINJAUAN PELAKSANAAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAN ARSIP KABUPATEN WAKATOBI . *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(03), 181–193. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i03.61>
- Suyono, S., Abbas, B. ., & Putera, A. . (2024). PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU, MANAJEMEN KONFLIK DAN KOMITMEN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 3(01), 01–19. <https://doi.org/10.62668/jide.v3i01.1013>

- Syamsir, S., Razak, A., & Yunus, A. (2024). PENGARUH KETERLIBATAN KERJA, PENGAWASAN DAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS I MOLAWA. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 3(01), 20–39. <https://doi.org/10.62668/jide.v3i01.1012>
- Swastika, Y. ., & Hamid, N. . (2023). PENGARUH LITERASI KEUANGAN, GENERASI SANDWICH OVERCONFIDENCE DAN DUAL ERNEST TERHADAP PERILAKU KEUANGAN. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(03), 112–118. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i03.753>
- Taufikurrahman, T., Nisrina, A. Y. ., Sutrisno, A. I. ., Meiyantika, A. S. ., Pranata, H. A. ., & Bintari, P. F. . (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI PENCATATAN KEUANGAN SEBAGAI SARANA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA UMKM &quot;FINZA COOKIES AND CAKE&quot; DI DESA MRANGGONLAWANG KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(02), 90–96. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i02.685>
- Ulfa Matoka, Muhammad Zain, Aldi Gunawan, & Putri Ayu Sriningsih. (2023). ANALISIS TRANSPORTASI DARAT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN WAKATOBI. *JIM : Journal Of International Management*, 1(02), 63–71. <https://doi.org/10.62668/jim.v1i02.278>